

## **Analisis Efektivitas Penginputan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Mendukung Akuntabilitas Keuangan Daerah Periode Tahun 2024 – 2025: Studi Kasus Kantor Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri**

**Nur Syarafina Dewi<sup>1</sup>, Susilaningtyas Budiana Kurniawati<sup>2</sup>, Syahriar Abdullah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Tunas Pembangunan Surakarta

*nursyarafinad@gmail.com<sup>1</sup>*

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the effectiveness of inputting Accountability Reports (SPJ) through two main systems: the Regional Financial Management Information System (SIPKD) and the Regional Government Information System (SIPD), in supporting financial accountability at the Selogiri Sub-District Office, Wonogiri Regency. A qualitative descriptive approach was used, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The results show that SIPKD is more operationally effective due to its flexibility, offline accessibility, and robust data validation system. On the other hand, SIPD offers advantages in terms of national data integration but still faces technical challenges such as dependence on internet connectivity and heavy server loads. Barriers to the effectiveness of SPJ input include limited human resources, lack of technical training, and suboptimal integration between SIPKD and SIPD. This study concludes that the success of regional financial management is determined not only by the sophistication of the system but also by the readiness of human resources and the adequacy of supporting infrastructure.*

**Keywords : SPJ, SIPKD, SIPD, Financial Accountability, Government Information Systems.**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penginputan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) melalui dua sistem utama, yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dalam mendukung akuntabilitas keuangan daerah di Kantor Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPKD lebih efektif secara operasional karena fleksibel dan dapat diakses secara offline, serta memiliki sistem validasi data yang baik. Di sisi lain, SIPD memiliki keunggulan dalam integrasi data nasional, namun masih menghadapi kendala teknis seperti ketergantungan pada jaringan internet dan beban server yang tinggi. Faktor penghambat efektivitas penginputan SPJ meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan teknis, serta belum optimalnya integrasi antara SIPKD dan SIPD. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem, tetapi juga kesiapan SDM dan dukungan infrastruktur yang memadai.

**Kata kunci : SPJ, SIPKD, SIPD, Akuntabilitas Keuangan, Sistem Informasi Pemerintah Daerah.**

## PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih pada suatu organisasi yang dituntut oleh rakyat untuk mendapatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsipnya serta dapat memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (Rizal Djalil, 2018). Salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola tersebut adalah pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, efektif, dan bertanggung jawab. Bagian penting dalam siklus pengelolaan keuangan adalah penyusunan dan pelaporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). SPJ adalah surat yang mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran dan buku besar pembantu pengeluaran kas yang dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran (Bastian, 2007).

Penyusunan SPJ prosesnya dengan dilakukan penginputan pada aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Aplikasi ini dirancang untuk mengintegrasikan proses perencanaan, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, hingga pelaporan pertanggungjawaban, sehingga dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang transparan, tertib, dan tepat waktu. Dengan penerapan sistem informasi tersebut, diharapkan mekanisme pelaporan keuangan, khususnya penyusunan SPJ, dapat dilaksanakan secara lebih sistematis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem informasi yang baik adalah sistem yang mampu menghasilkan kinerja dan manfaat bagi penggunaannya (Abdillah & Jogyanto, 2011). Namun, dalam praktiknya, berdasarkan hasil penelitian (Khairunnas et al, 2021) ditemukan bahwa implementasi SIPKD dipengaruhi secara signifikan oleh kompetensi SDM, pengendalian intern, dan *good governance*, dimana keterbatasan SDM dan aspek pengendalian menjadi kendala utama dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian lain oleh Dewi & Wulandari (2023) dalam studi implementasi SIPKD di Provinsi Bali menegaskan bahwa pemahaman SDM terhadap sistem dan pelatihan yang kurang memadai masih menjadi tantangan utama. Begitupun implementasi dan efektivitas penginputan SPJ melalui SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) dan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang saat ini sedang dijalankan di Kantor Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kendala teknis, hingga pemahaman terhadap sistem yang belum merata. Permasalahan tersebut dapat berdampak pada akurasi, ketepatan waktu, dan kualitas laporan keuangan yang disampaikan.

Fenomena yang banyak terjadi, menunjukkan bahwa rendahnya efektivitas sistem informasi bukan semata disebabkan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh faktor kapasitas sumber daya manusia (SDM), dukungan infrastruktur, dan sinkronisasi antar sistem. Jika tidak segera diatasi, maka ketidaktepatan data, keterlambatan pelaporan, serta tidak validnya SPJ dapat berdampak besar pada akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. Berdasarkan kondisi di atas, terkait fenomena yang ada, dalam penerapan penginputan SPJ di SIPKD dan SIPD terdapat masalah juga

sampai di tingkat kecamatan. Jika efektivitas sistem rendah, maka potensi ketidaktepatan data, keterlambatan pelaporan, hingga tidak validnya SPJ dapat menghambat proses akuntabilitas keuangan. Padahal, sistem yang baik tidak hanya dilihat dari aspek teknis, tetapi juga dari bagaimana sistem tersebut digunakan secara konsisten dan benar oleh SDM yang terlibat (Wibowo, 2022).

Upaya pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi pada penerapan SIPKD dan SIPD sebenarnya telah dilakukan, salah satunya melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada pemerintah daerah. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada aparatur tentang tata cara penggunaan aplikasi, penyesuaian struktur pelaporan, serta penguatan kapasitas SDM yang mengelola sistem (Kemendagri, 2023). Namun demikian, pelaksanaan sosialisasi tersebut masih belum merata dan belum menjangkau secara optimal hingga ke tingkat kecamatan. Banyak aparatur di daerah, terutama yang berada di wilayah terpencil, belum mendapatkan akses informasi maupun pelatihan teknis secara memadai. Hal ini menyebabkan masih adanya ketergantungan terhadap operator tertentu, serta kesulitan dalam mengakses dan memahami aplikasi SIPD maupun SIPKD (Diklatpemerintah.id, 2025).

Untuk itu, diperlukan upaya lanjutan berupa peningkatan intensitas bimtek yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah serta pemanfaatan media digital sebagai sarana pembelajaran jarak jauh. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Analisis Efektivitas Penginputan SPJ pada Aplikasi SIPKD dan SIPD dalam Mendukung Akuntabilitas Keuangan Daerah Periode Tahun 2024 - 2025, dengan studi kasus pada Kantor Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri.

## **TINJAUAN LITERATUR**

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak yang diberi amanah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya kepada pihak yang memberi amanah. Dalam konteks pemerintahan daerah, akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pengelolaan keuangan publik yang transparan, tepat guna, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas keuangan daerah diwujudkan melalui penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan ini mencerminkan seberapa baik pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan, belanja, dan aset daerah secara efektif dan efisien.

Pada peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, diuraikan pengertian pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut: "Keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan". Menurut Halim (2012, dikutip dalam Yoga Pratama & Faizal Fikri, 2020.) pengelolaan keuangan daerah adalah hak dan kewajiban yang dinilai dapat dengan uang serta segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai kekayaan daerah berdasarkan peraturan perundangundangan. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban mencakup seluruh kegiatan dalam satu siklus APBD.

Arisandy dan Dewi (2023) menyatakan bahwa kualitas SPJ sangat dipengaruhi oleh kompetensi aparatur pengelola keuangan, ketersediaan dokumen pendukung, serta penerapan sistem informasi yang terintegrasi seperti SIPKD atau SIPD. Ketidaksiuaian atau keterlambatan dalam penyusunan SPJ dapat menghambat proses pelaporan dan pencairan anggaran berikutnya. Lebih lanjut, menurut Rahayu dan Prasetyo (2021), SPJ tidak hanya penting dalam aspek administratif, tetapi juga mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyusunan SPJ yang baik menunjukkan adanya tata kelola pemerintahan yang sehat dan kepatuhan terhadap aturan.

Dengan demikian, Surat Pertanggungjawaban merupakan instrumen penting dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai wujud akuntabilitas publik atas penggunaan dana yang bersumber dari APBD.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2022), metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena atau keadaan yang ada pada objek penelitian secara mendalam dan apa adanya. Pendekatan dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai kondisi nyata di lapangan terkait proses, kendala, dan dinamika implementasi Sistem Informasi Akuntansi Pemerintahan Daerah, khususnya penginputan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kantor Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri.

Penelitian dilaksanakan di Kantor Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri, dengan pertimbangan bahwa wilayah ini telah menggunakan kedua sistem, yakni SIPKD dan SIPD, dalam proses pengelolaan keuangannya. Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2025 sampai bulan Juli tahun 2025.

Informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive (purposive sampling)*, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu, terutama keterlibatan langsung dalam proses penginputan SPJ maupun pengawasan dan pelaporan keuangan. Informan yang dijadikan subjek penelitian sejumlah 5 (lima) antara lain: Sekretaris Camat, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bendahara pengeluaran, Operator SIPKD dan SIPD di Kantor Kecamatan Selogiri dan Staf bidang perencanaan dan keuangan.

Menurut Sugiyono (2022), teknik pengumpulan data dalam penelitian, secara umum, terdiri dari: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menurut Sugiyono (2022) Analisis data merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data kedalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data yang telah didapatkan. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara **kualitatif**, dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan memahami makna dari data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Keseluruhan proses ini, peneliti berupaya menjaga objektivitas, menggunakan pendekatan induktif dalam membaca pola-pola data, dan melibatkan refleksi kritis terhadap dinamika yang terjadi di lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebagai unit pemerintahan yang berada di tingkat kecamatan, Kantor Kecamatan Selogiri memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran yang melibatkan sejumlah dana untuk mendukung kegiatan operasional dan pembangunan di wilayah kecamatan. Dalam hal ini, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara transparan, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan anggaran yang efektif, Kantor Kecamatan Selogiri memanfaatkan teknologi informasi melalui penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Kedua sistem ini digunakan untuk mengelola dan memantau seluruh transaksi keuangan, mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaporan keuangan.

Hasil wawancara yang kemudian dianalisis dengan merujuk pada prinsip-prinsip akuntabilitas keuangan, sebagaimana diatur dalam PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Efektivitas Penginputan SPJ melalui SIPKD dan SIPD dibandingkan Metode Manual dinilai jauh lebih efektif dibandingkan dengan metode manual. Narasumber menyatakan bahwa proses seperti pengarsipan dokumen, penginputan data, serta penyusunan laporan keuangan kini dapat dilakukan secara digital, sehingga lebih cepat, rapi, dan efisien.

Kemudahan dalam penyusunan SPJ mengindikasikan bahwa sistem yang digunakan tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja, tetapi juga memperluas partisipasi pegawai lintas bidang dalam proses pelaporan keuangan. Aplikasi ini turut mendukung proses kerja yang lebih kolaboratif, dengan meminimalisir hambatan teknis dan prosedural. Dengan demikian, penggunaan SIPKD dan SIPD mampu meningkatkan kapasitas organisasi dalam menjalankan fungsi administrasi keuangan.

### **Kendala yang dihadapi**

Kendala teknis menjadi salah satu hambatan dominan yang dihadapi dalam proses penginputan SPJ melalui SIPKD dan SIPD. Dari hasil wawancara, mayoritas

responden menyampaikan bahwa gangguan seperti lambatnya jaringan internet, error pada server pusat, serta ketidakstabilan sistem SIPD sering kali terjadi, terutama menjelang akhir bulan atau saat mendekati tenggat waktu pelaporan. Selain itu, SIPD juga kerap mengalami pemeliharaan sistem (*maintenance*) tanpa pemberitahuan sebelumnya, sehingga mengganggu alur kerja pengguna.

Keterbatasan kompetensi pengguna dalam mengoperasikan aplikasi SIPKD dan SIPD juga menjadi kendala yang cukup signifikan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak semua pegawai di lingkungan Kantor Kecamatan Selogiri memiliki pemahaman dan keterampilan teknis yang memadai dalam menggunakan aplikasi tersebut. Umumnya, hanya operator utama atau staf yang telah terbiasa menggunakan komputer yang mampu mengoperasikan aplikasi dengan baik, sedangkan pegawai lainnya masih memerlukan bimbingan atau pelatihan lanjutan.

Permasalahan ini mengindikasikan pentingnya peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkala, terutama dalam menghadapi perkembangan sistem atau fitur baru. Keberhasilan implementasi sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh perangkat teknologi, namun juga ditentukan oleh kesiapan dan kompetensi penggunanya.

Deadline pelaporan keuangan, khususnya pada akhir bulan atau akhir tahun anggaran, seringkali menjadi tekanan tersendiri bagi pegawai yang bertanggung jawab dalam proses penginputan SPJ. Beberapa narasumber menyatakan bahwa ketika mendekati batas waktu pelaporan, sistem justru mengalami gangguan teknis seperti lambat atau tidak bisa diakses. Akibatnya, pegawai harus bekerja di luar jam kerja normal (*lembur*) untuk mengejar penyelesaian laporan.

Hal ini berdampak pada penurunan kualitas input data akibat proses yang dilakukan secara tergesa-gesa. Dengan demikian, sistem informasi keuangan daerah perlu memiliki ketahanan teknis yang lebih baik, khususnya pada periode dengan trafik pengguna yang tinggi, guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas.

Sebagian responden mengungkapkan bahwa fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi SIPD dirasa terlalu kompleks dan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pelaporan di tingkat kecamatan. Format yang tersedia dalam sistem tidak selalu fleksibel dan sering kali harus disesuaikan kembali secara manual oleh pengguna. Selain itu, adanya pembaruan sistem (*update*) terkadang menyebabkan perubahan format input, yang justru membingungkan pengguna.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengembangan aplikasi, perlu adanya penyesuaian desain dan fitur dengan konteks pengguna di lapangan. Sistem informasi yang terlalu kompleks tanpa disertai sosialisasi dan pelatihan yang memadai akan menghambat efektivitas penggunaannya, terutama di instansi yang masih dalam proses adaptasi digital.

## **Pengaruh penginputan SPJ melalui SIPKD dan SIPD terhadap akuntabilitas keuangan daerah**

Penginputan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) secara digital melalui aplikasi SIPKD dan SIPD memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan

akuntabilitas keuangan daerah di Kantor Kecamatan Selogiri. Akuntabilitas dalam konteks pengelolaan keuangan daerah tidak hanya merujuk pada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana publik secara terbuka, tetapi juga mencakup aspek transparansi, keakuratan data, kemudahan dalam pelaporan, serta efektivitas pengawasan internal.

Berdasarkan hasil wawancara salah satu dampak utama dari digitalisasi penginputan SPJ adalah meningkatnya transparansi dalam pengelolaan keuangan. Seluruh responden menyampaikan bahwa penggunaan SIPKD dan SIPD memungkinkan setiap transaksi terekam secara otomatis dalam sistem, sehingga dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang secara real-time. Informasi mengenai anggaran, realisasi belanja, serta bukti pendukung keuangan tersedia secara terbuka dalam sistem dan dapat ditelusuri dengan mudah.

Transparansi ini mengurangi peluang terjadinya manipulasi data atau penyembunyian informasi keuangan. Dengan jejak digital yang tercatat secara sistematis, setiap perubahan atau transaksi yang dilakukan dapat dimonitor dan diaudit kapan saja. Hal ini mencerminkan implementasi prinsip akuntabilitas publik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Secara keseluruhan, penginputan SPJ melalui SIPKD dan SIPD terbukti memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan daerah. Responden menegaskan bahwa seluruh kegiatan dan penggunaan anggaran kini dapat dipertanggungjawabkan dengan dukungan data konkret yang terekam dalam sistem. Aplikasi ini membantu menciptakan sistem pelaporan yang profesional, transparan, dan dapat diaudit, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah.

Peningkatan akuntabilitas ini selaras dengan prinsip good governance, yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi, integritas, dan efisiensi dalam pelayanan publik, termasuk dalam aspek pengelolaan keuangan. SIPKD dan SIPD, meskipun masih memiliki beberapa keterbatasan teknis, telah mampu menjadi instrumen penting dalam memperbaiki sistem pertanggungjawaban keuangan daerah di tingkat kecamatan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Kantor Kecamatan Selogiri, dapat disimpulkan bahwa :

- a. Efektivitas penginputan SPJ melalui SIPKD dan SIPD penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dinilai lebih efektif dalam mendukung pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan daerah di tingkat kecamatan, khususnya dalam penginputan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Hal ini karena SIPKD lebih mudah digunakan, bersifat fleksibel, dapat dioperasikan secara offline, serta memiliki sistem

validasi data yang akurat dan responsif. Sementara itu, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memiliki keunggulan dalam integrasi dan sinkronisasi data secara nasional.

- b. Dalam implementasinya, SIPD menghadapi kendala berupa ketergantungan pada koneksi internet yang stabil dan beban server pusat yang tinggi, sehingga sering menghambat proses input SPJ di tingkat kecamatan. Sedangkan SIPKD lebih jarang menghadapi kendala teknis karena dapat dioperasikan secara offline, namun tetap terbatas pada lingkup daerah sehingga integrasi data dengan pusat tidak optimal.
- c. Pengaruh Penginputan SPJ pada aplikasi SIPKD dan SIPD memiliki pengaruh yang berbeda terhadap akuntabilitas. SIPKD lebih mendukung tercapainya prinsip transparansi, efisiensi, dan ketepatan laporan keuangan di tingkat kecamatan. Sedangkan SIPD, meskipun terkendala secara teknis, memiliki peran penting dalam mendukung integrasi data dan akuntabilitas keuangan secara nasional. Dalam konteks Kantor Kecamatan Selogiri, SIPKD lebih berkontribusi terhadap keakuratan dan kelancaran pelaporan keuangan, sementara SIPD lebih berorientasi pada keseragaman sistem keuangan daerah secara nasional.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Bagi Pemerintah Daerah (Pemkab Wonogiri) perlu dilakukan penguatan infrastruktur jaringan internet di seluruh kecamatan, termasuk Selogiri, agar implementasi SIPD dapat berjalan optimal dan tidak terganggu oleh keterbatasan teknis.
- b. Pengguna Sistem (Petugas Perencanaan dan Keuangan Kecamatan) diharapkan terus meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan SIPD melalui pelatihan rutin, mengingat sistem ini merupakan instrumen resmi nasional yang akan terus digunakan ke depan.
- c. Bagi Pemerintah Pusat (Kemendagri) disarankan agar pembaruan sistem SIPD dilakukan secara terencana dan disertai dengan sosialisasi yang memadai kepada pemerintah daerah, agar tidak menimbulkan kebingungan dalam implementasinya di lapangan.

Penelitian Selanjutnya dapat dilakukan studi perbandingan yang lebih luas antara SIPKD dan SIPD di beberapa kecamatan atau kabupaten lain, agar diperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas masing-masing sistem di berbagai kondisi daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

Admin Bappeda. (2023). *Dilema daerah terhadap dua aplikasi SIPD*. Bappeda Kabupaten Agam. <https://bappeda.agamkab.go.id/View-berita/dilema-daerah-terhadap-dua-aplikasi-sipd-.html>

- Amalia, R. D., & Santoso, H. A. (2024). Implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) terhadap kualitas laporan keuangan di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. *Universitas Muhammadiyah Gresik*.
- Arisandy, R., & Dewi, M. (2023). Analisis kualitas surat pertanggungjawaban (SPJ) dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 8(1), 35–47.
- Dewi, G. A., & Wulandari, A. A. A. I. (2023). Tantangan dan harapan implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 8(2). <https://doi.org/10.38043/jiab.v8i2.4619>
- Ditjen Bina Keuangan Daerah. (2023). *Bimbingan teknis penerapan sistem informasi pemerintahan daerah bidang pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan daerah*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. <https://keuda.kemendagri.go.id/pages/view/244-bimtek-penerapan-sipd-bidang-pelaksanaan--penatausahaan--pertanggungjawaban---pelaporan-keuda>
- Fadilah, N., & Wijaya, A. (2024). Efektivitas sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dalam mendukung akuntabilitas keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 15(2), 77–89.
- Fadli, A., Pratiwi, N., & Lestari, I. (2023). Pemanfaatan SIPD dalam penyusunan anggaran daerah yang efektif. *Jurnal Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*, 7(2), 88–101.
- Indira, S., & Neneng, W. (2024). Efektivitas sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.
- Nikolas, M. H. (2024). *SIPD Kemendagri alami gangguan kendala realisasi anggaran. Antara Kaltim*. <https://kaltim.antaranews.com/berita/226737/sipd-kemendagri-alami-gangguan-jadi-kendala-realisasi-anggaran>
- Nursyid, W. M. N., & Indrayeni, I. (2023). SIPKD dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah: Studi pada BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 1(3), 268–280.
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rai Nadi Arta, I. K., Sudarma, M., & Tarka, I. K. (2024). Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) sebagai alat pengendali internal pemerintah daerah. *Jurnal Sistem Informasi Daerah*, 5(1), 102–117.

# Economic Reviews Journal

Volume 5 Nomor 1 (2026) 465 – 474 E-ISSN 2830-6449

DOI: 10.56709/mrj.v5i1.1065

- Rizal, N. A., & Amrie, F. (2024). Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.
- Rosita, E. N., & Rosalina, R. (2023). Pengaruh penerapan SIPKD dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah.
- Septiani, I., & Isnawaty, N. W. (2024). Efektivitas SIPD dalam pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.
- Supendi, I. (2024). *Gaji ASN di Sukabumi belum cair karena terkendala SIPD*. *Sukabumiupdate.com*.  
<https://www.sukabumiupdate.com/sukabumi/149514/gaji-asn-di-sukabumi-belum-cair-karena-terkendala-sipd-sekda-selalu-ngelag>.